

BAB VI I

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tentang kondisi rata-rata penguasaan tanah, rata-rata pendapatan petani, ketimpangan penguasaan tanah pertanian, ketimpangan pendapatan petani, jumlah yang berusaha di sektor pertanian dan jumlah buruh nonpertanian di Provinsi Sumatera Barat terdapat perbedaan antara tahun 2004 dan tahun 2014. Sebanyak 77 kecamatan pada tahun 2004 berada pada luas rata-rata penguasaan tanah dengan nilai kurang dari 0,75 Ha sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 89 kecamatan berada pada luas rata-rata penguasaan tanah dengan nilai antara lebih dari 0,75 Ha tetapi kurang dari 2 Ha. Sementara itu untuk angka gini ratio ketimpangan penguasaan tanah pada tahun 2004 sebanyak 66 kecamatan memiliki gini ratio ketimpangan tanah pada nilai 0,4 atau tingkat keparahan ketimpangan rendah sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 73 kecamatan memiliki gini ratio ketimpangan tanah sebesar $0,4 < G < 0,5$ atau pada tingkat keparahan ketimpangan sedang. Sedangkan kondisi pendapatan petani dari sub sektor pertanian pada tahun 2004 didominasi oleh perkebunan (28,61 persen) dan tanaman padi (28,09 persen) sedangkan pada tahun 2014 subsektor perkebunan lebih mendominasi dengan kontribusi 41,45 persen dan kontribusi terbesar dari pendapatan petani berasal dari usaha sektor pertanian untuk tahun 2004 maupun tahun 2014. Sementara itu angka ketimpangan pendapatan pada tahun 2004 dan tahun 2014 berada pada angka 0,4 atau kategori tingkat keparahan rendah. Selanjutnya kondisi tingkat pendidikan untuk yang berusaha di sektor pertanian, buruh di sektor pertanian dan buruh non pertanian dari anggota rumah tangga pertanian pada tahun 2004 berada pada pendidikan rendah dengan persentase yang memiliki ijazah SD dan tidak memiliki ijazah sebesar 70,5 persen dan pada tahun 2014 angka ini menjadi 63,5. Lebih lanjut tenaga kerja dari rumah tangga pertanian ini didominasi oleh laki-laki baik pada tahun 2004 maupun tahun 2014 dan berada pada

rentang usia terbanyak 40 tahun ke atas yaitu 59 persen pada tahun 2004 menjadi 69 persen pada tahun 2014.

Sedangkan berdasarkan hasil analisis deskriptif tentang kondisi rata-rata penguasaan tanah, rata-rata pendapatan petani, ketimpangan penguasaan tanah pertanian, ketimpangan pendapatan petani, jumlah yang berusaha di sektor pertanian dan jumlah buruh nonpertanian di Provinsi Jambi terdapat perbedaan antara tahun 2004 dan tahun 2014. Sebanyak 25 kecamatan pada tahun 2004 berada pada luas rata-rata penguasaan tanah dengan nilai lebih dari 2 Ha dan kurang dari 3 Ha sedangkan pada tahun 2014 angka ini berubah menjadi 47 kecamatan berada pada luas rata-rata penguasaan tanah dengan nilai yang sama. Sementara itu untuk angka gini ratio ketimpangan penguasaan tanah pada tahun 2004 sebanyak 31 kecamatan memiliki gini ratio ketimpangan tanah pada nilai 0,4 atau tingkat keparahan ketimpangan rendah sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 50 kecamatan memiliki gini ratio ketimpangan tanah sebesar $0,4 < G < 0,5$ atau pada tingkat keparahan ketimpangan sedang. Sedangkan kondisi pendapatan petani dari sub sektor pertanian pada tahun 2004 didominasi oleh perkebunan (68 persen) dan pada tahun 2014 subsektor perkebunan naik menjadi 69 persen dan kontribusi terbesar dari pendapatan petani berasal dari usaha sektor pertanian untuk tahun 2004 maupun tahun 2014. Sementara itu angka ketimpangan pendapatan pada tahun 2004 dan tahun 2014 berada pada angka 0,4 atau kategori tingkat keparahan ketimpangan rendah. Selanjutnya kondisi tingkat pendidikan untuk yang berusaha di sektor pertanian, buruh di sektor pertanian dan buruh non pertanian dari anggota rumah tangga pertanian pada tahun 2004 berada pada pendidikan rendah dengan persentase yang memiliki ijazah SD dan tidak memiliki ijazah sebesar 70,5 persen dan pada tahun 2014 angka ini menjadi 63,5. Lebih lanjut tenaga kerja dari rumah tangga pertanian ini didominasi oleh laki-laki baik pada tahun 2004 maupun tahun 2014 dan berada pada rentang usia terbanyak 40 tahun ke atas yaitu 44,5 persen pada tahun 2004 menjadi 61,3 persen pada tahun 2014.

Selanjutnya kondisi Provinsi Riau berbeda dengan kedua provinsi sebelumnya. Pada Provinsi Riau lebih dominan kecamatan dengan kepemilikan lahan lebih dari 3 Ha baik pada tahun 2004 maupun tahun 2014. Disamping itu selama periode tahun 2004 sampai tahun 2014 telah terjadi penurunan jumlah kecamatan dengan kepemilikan lahan rata-rata kurang dari 0,75 Ha sebesar 19 persen. Sedangkan dalam hal tingkat ketimpangan penguasaan tanah selama periode tahun 2004 sampai tahun 2014 telah terjadi kenaikan tingkat ketimpangan penguasaan tanah. Pada tahun 2004 Pada provinsi Riau lebih dominan tingkat ketimpangan penguasaan tanah yang rendah namun pada tahun 2014 kondisi ini berubah yaitu jumlah kecamatan dengan tingkat ketimpangan sedang dan tinggi bertambah sekitar 35 persen. Selanjutnya kondisi ketimpangan pendapatan petani selama periode tahun 2004 sampai tahun 2014 umumnya kecamatan-kecamatan berada pada tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah. Namun walaupun demikian terjadi kecenderungan penurunan jumlah kecamatan dengan tingkat ketimpangan rendah sementara itu kecamatan-kecamatan yang berada pada tingkat ketimpangan sedang dan tinggi cenderung meningkat. Sedangkan tingkat pendidikan, status gender dan usia kondisi Provinsi Riau tidak jauh berbeda dengan provinsi sebelumnya.

Selanjutnya dari hasil regresi yang dilakukan pada tahun 2004 dan 2014 di Provinsi Sumatera Barat dari ke dua model regresi terdapat pengaruh ketimpangan pendapatan petani, jumlah yang berusaha di sektor pertanian dan jumlah buruh non pertanian terhadap ketimpangan penguasaan tanah. Hasil regresi model di Provinsi Sumatera Barat adalah ketiga variabel bebas (Ketimpangan Pendapatan, Jumlah yang berusaha di sektor pertanian dan jumlah buruh non pertanian) berpengaruh terhadap ketimpangan penguasaan tanah dengan tingkat signifikansi satu persen dan lima persen.

Sementara itu untuk model regresi Provinsi Jambi tahun 2004 tidak bisa di analisis karena nilai dari uji F model lebih besar dari 0,05. Sementara itu untuk tahun 2014 diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh ketimpangan pendapatan petani, jumlah yang berusaha di sektor pertanian dan jumlah

buruh non pertanian terhadap ketimpangan penguasaan tanah dengan tingkat signifikansi satu persen.

Selanjutnya pada Provinsi Riau hasil regresi untuk kedua tahun (Tahun 2004 dan tahun 2014) tidak bisa dilakukan analisis. Hal ini disebabkan oleh data yang tersedia tidak memenuhi uji asumsi klasik atau model yang dihasilkan tidak memenuhi kriteria BLUE. Adapun uji asumsi klasik yang tidak terpenuhi adalah pada model tahun 2004 ditemukan kondisi heteroskedastisitas yang mana setelah dilakukan uji Breusch-Pagan/Cook Weisberg ditemukan $\text{prob} > \chi^2 = 0,0472$ atau kurang dari 0,05. Sementara itu agar data bebas dari heteroskedastisitas kondisinya harus $\text{prob} > \chi^2 > 0,05$. Selanjutnya pada data tahun 2014 data yang tersedia tidak memenuhi uji asumsi normalitas. Setelah dilakukan uji Shapiro-wilk W test dan Skewness/Kurtosis test ditemukan $\text{prob} > \chi^2 = 0,0023$ atau kurang dari 0,05. Sementara itu agar data memenuhi uji asumsi normalitas kondisinya harus $\text{prob} > \chi^2 > 0,05$.

Rekomendasi kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ketimpangan penguasaan tanah pada ketiga provinsi ini adalah dengan memperhatikan kebijakan pertanian di sektor hulu dan sektor hilir. Adapun kebijakan di sektor hulu diantaranya adalah subsidi pupuk dan bibit, mengintensifkan program untuk pembiayaan pertanian, pembaharuan kebijakan irigasi, penyuluhan yang intensif dan menjadikan sektor pertanian menarik minat generasi muda serta peremajaan tanaman perkebunan. Sementara itu kebijakan pertanian di sektor hilir diantaranya adalah kebijakan harga, nonharga, struktural, pemasaran dan pengembangan teknologi pasca panen yang bisa menguntungkan petani serta Penatagunaan tanah dengan melibatkan petani sehingga menghasilkan kebijakan pembangunan yang integratif.

B. Saran

Proses ketimpangan penguasaan tanah berlansung secara perlahan dan akan semakin parah dari tahun ke tahun. Kondisi ini perlu diatasi dengan menerapkan kebijakan pembangunan yang tepat yang melibatkan masyarakat khususnya petani atau konsep *bottom-up planning* sehingga dalam

pemanfaatan tanah dapat dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan peruntukkan tanah. Disamping itu perlu dilakukan program peningkatan pengetahuan petani dan minat generasi muda terhadap pertanian.

Salah satu tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh ketimpangan pendapatan petani, jumlah yang berusaha di sektor pertanian dan jumlah buruh non pertanian terhadap ketimpangan penguasaan tanah dengan menggunakan data cross section, dari hasil penelitian masih terdapat variabel lain di luar model yang mempengaruhi ketimpangan tanah oleh karena itu perlu di adakan penelitian lain untuk mencari pengaruh ini.

